

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, H., Muhammad, S. K. 2019. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
- Adnan Buyung Nasution, 2007. Bantuan Hukum Di Indonesia, LP3ES. Jakarta
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, Book V, 2009. Oxford University Press
- Binziad Khadafi (*et.al.*), 2011. Penasehat Hukum Indonesia Mencari Legitimasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia. 2006
- Darman Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Davis, M., & Stark, A. (Eds.). (2001). Conflict of Interest in the Professions. Oxford University Press on Demand.
- Dio Ashar Wicaksana, (*et.al.*), “Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019” dalam: Tanti Dian Ruhama (*et.al.*) Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia. Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI. Jakarta. 2021
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta Alex Media Komputindo, 2000
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Fuad, M., (*et.al.*), Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2020

- Fulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian. Mengelola Legal Clinic. ILRC. Jakarta. 2010
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, A. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, A., dan Iqbal, M, Pengelolaan keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta, 2019
- Halim, A. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. 2017
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Mahir Amin. Konsep Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam. Jakarta. 2014
- Mahmudi. Regional financial management: Concepts, applications, and analysis. UPP STIM YKPN. 2019
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. 2017
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.). The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore. 2016
- Mosgan Situmorang, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011).
- Muhamad. Manajemen Dana Bank Syariah. Rajawali Pers. Jakarta. 2015
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan IV. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2017
- Muladi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Habibie Center. Jakarta. 2002
- Mulyamah. Manajemen Perubahan. Yudhistira. Jakarta. 1987
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, (Jakarta: Kencana 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Nusrhasan Ismail dalam Aprilia Silvi Suciana, Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby), Disertasi, Universitas Nasional, Jakarta, 2023

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Bandung: Bina Ilmu, 1987)

Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P., Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang 2015-2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 2020

Prawironegoro, D. Manajemen keuangan: Konsep dan aplikasi dalam bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011

Primts, D. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta. 2002

R. Poedjawijatna. 1982. Etika: Filsafat Tingkah Laku. Bina Aksara, Jakarta

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Rizhan, A. Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. Kodifikasi, 2(1). 2020

Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (New Haven: Yale University Press, 1922

Sasongko, C., dan Parulian, S.R., Anggaran. Salemba Empat. Jakarta. 2013

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakt. Bandung. 2006

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014

SF. Marbun, Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia, Disertasi, tidak diterbitkan, program pasca sarjana fakultas hukum Universitas Padjajaran Bandung. 2001

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Sugiarto, T. Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. IUS, 2(1). 2015

Jurnal

Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan hukum (Equality Before the Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang. 2013

Afuan Fajrian Putra dan Novia Dhiniharitsa. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja". Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 9 No. 1 Januari 2020

Angga, *et.all*. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018

Budiyanto, H. "Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Yang Berbasis Keadilan di Kabupaten Siak Indrapura". Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(6), 2018

Darmawan (*et.al*), "Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik *Good Governance* di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi". Journal of Social Contemplativa, Volume 3 Nomor 1. 2025

Dwisvimiar, I. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". Jurnal Dinamika Hukum. 2011

- Eny Kusdarini, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24 Oktober 2017
- Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2. 2023
- Galley, N., Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. “*Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif*”. *Indonesian Journal of Law Research*, 3(1). 2025
- Heather Leawoods, Gustav Radbruch: “An Extraordinary Legal Philosopher,” *Wash. UJL & Pol’y* 2. 2000
- Indriani Puspitasari. “Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran, Optimalisasi dan Kinerja Keuangan”. *Kindai*, Vol 18, Nomor 3. (tt)
- James R. Maxeiner, “Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law,” *Houston Journal of International Law* 31, No. 1. (2008
- Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang. 2013
- Mario Julyano dan Aditya Yuli, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, No.1. 2019
- Melissa Silalahi, Devi. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6(1). 2020
- Muhadi Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Al-Mawarid* No. 12 Tahun 2004, Fakultas Ilmu Agama UII. Yogyakarta. 2004

- Novitasari, D., & Amanah, L. A. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran". Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. 2016
- Paat, Irwin Steve, Paransi, Eugenius dan Rumokoy, Nike Kelly. "Implementasi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Artikel Jurnal 11, No. 5. 2022
- Parulian Sihombing. "Bantuan Hukum adalah Hak Kita". The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Jakarta. 2012
- Putri dan Ummul Hanifah. 2018. "*Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.*" INA-Rxiv: Universitas Negeri Padang
- Ramdan, A., "Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin". Jurnal Konstitusi, 2014
- Sadhu Bagas Suratno, „Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik“, E-Journal Lentera Hukum.
- Setiawan, A. "Sosialisasi Bantuan Hukum dan Hambatan dalam Implementasinya di Indonesia". Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(4). 2020
- Sunggara, M. A. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Narkotika Penyalagunaan Dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional". Jurnal Solusi, 18(2). 2020
- Syukri, (et.al.). "Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sinjai". Jurnal Ilmiah Adminstrasita' ISSN 2301-7058 Vol 8. No. 02. 2017
- Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," Law and Philosophy 28, No.3. 2009
- Widjiastuti, Agustin, "Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn", Perspektif, 22.2 2017

Wisman, (et.al.). “Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi”. Jurnal Hukum De'rechtsstaat 5, no. 2, 2019

Yulianti, S. W. “Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif”. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan. 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Internet/Website

Abdul Wahid Wathoni. Rezim Efisiensi: Asta Cita atau Duka Cita. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/527915/rezim-efisiensi-asta-cita-atau-duka-cita>. Diakses 26 Oktober 2025.

Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,” *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>

Artikel Djpb Kemenkeu. 2023, [Diakses 26 Maret 2025]

Berita Acara Rapat Penelaahan Nomor: BA-47/AG.52/2025 tanggal 6 Mei 2025, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2025

Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Kaleidoskop Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022. diakses tanggal 24 Oktober 2025, 15:21

<https://bantuanhukum.bphn.go.id/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 15:03

Iwan Wahyu Pujiarto, *et.al.* “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” <https://doaj.org/>

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 diakses melalui https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_verifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf

Paul Prettitore. Poverty and Legal Problems in Jordan. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22734> diakses pada 26 Oktober 2025

Pedoman Standar Layanan Posbankum Desa/Kelurahan. Pusat Pembudayaan dan

Bantuan Hukum, BPHN 2025.

<https://bphn.go.id/informasi/read/2022090906414667/apa-saja-layanan-layanan-pada-bphngoid>. Diakses 22 Oktober 2025;21:01

Tanzi, V., & Davoodi, H. Corruption, public investment, and growth. IMF Working Paper WP/97/139. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781451929515.001> .1997

Wijayanta, T. (2012). *Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. *Mimbar Hukum*, 24(1), 110. <https://doi.org/10.22146/jmh.16149>

Yani, P. A. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(3), 1–13. <https://www.cnnindonesia.com>